

Pembahasan

LAPORAN BULAN DESEMBER

Badan Pengarah Papua 2025

TEMA :

Kolaborasi Pembangunan Menuju
Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera

22 Desember 2025



Forum Komunikasi dan Kementerian dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua Tengah

02 Desember 2025 (diwakilkan Pokja Papua Produktif)

TUJUAN RAPAT

1. Membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan BPJS dalam peningkatan pelayanan publik terutama bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
2. Menyamakan persepsi dan kebijakan terkait implementasi program JKN-KIS dan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Papua Tengah.
3. Mengidentifikasi tantangan lapangan, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, kepesertaan masyarakat, serta kendala administratif.
4. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat.
5. Menyusun rencana tindak lanjut guna memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat kerja sama lintas lembaga.



HASIL RAPAT

1. Komitmen bersama untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS, terutama pada masyarakat rentan, pekerja informal, dan wilayah terpencil Papua Tengah.
2. Kesepakatan peningkatan layanan kesehatan melalui optimalisasi fasilitas kesehatan, penambahan tenaga medis, dan peningkatan kualitas alur pelayanan JKN.
3. Rencana aksi percepatan validasi data kepesertaan dengan dukungan pemerintah daerah, dinas sosial, dan distrik.
4. Pemetaan kebutuhan infrastruktur kesehatan di beberapa kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai untuk diajukan dalam program prioritas tahun berikutnya.
5. Penguatan koordinasi rutin antara Pemerintah Provinsi, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan melalui forum komunikasi triwulanan.
6. Penegasan peran BPJS dalam mendukung transformasi layanan kesehatan nasional di Papua Tengah, terutama terkait pelayanan primer dan rujukan.
7. Rekomendasi perbaikan sistem klaim dan pelayanan Faskes, termasuk peningkatan transparansi dan pendampingan teknis bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

Pembukaan Implementasi Program Prioritas Bidang Pendidikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, 03 Desember 2025

1. Penyampaian Kebijakan Umum Pendidikan 2025

- Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan **pendidikan** sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan Papua Tengah.
- Fokus diarahkan untuk **meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan**, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.
- Penegasan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan program pendidikan mendukung **misi percepatan pembangunan SDM Papua Tengah**.

2. Penetapan Program Prioritas Bidang Pendidikan 2025

Rapat menyepakati beberapa program utama:

- **Peningkatan kualitas guru**, termasuk pelatihan kompetensi, sertifikasi, serta distribusi guru ke wilayah kurang tenaga pendidik.
- **Penguatan fasilitas pendidikan**, melalui rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta penyediaan sarana penunjang (laboratorium, perpustakaan, dan asrama).
- **Perluasan akses pendidikan**, mencakup pemberian beasiswa, penyediaan transportasi pendidikan, dan dukungan bagi anak usia sekolah yang belum bersekolah.
- **Digitalisasi pendidikan**, termasuk program sekolah digital, pelatihan IT untuk guru, serta penyediaan jaringan internet di sekolah prioritas. **Pemberdayaan pendidikan karakter dan budaya lokal**, melalui kurikulum muatan lokal Papua Tengah.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- Penyusunan jadwal implementasi program prioritas pendidikan 2025.
- Penetapan sekolah-sekolah prioritas untuk intervensi awal.
- Pembentukan **Tim Teknis Implementasi Program Pendidikan 2025** tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- Finalisasi indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan capaian yang terukur.

4. Penutup

- Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan kembali komitmen untuk **menjadikan Papua Tengah sebagai provinsi dengan SDM unggul, sehat, dan berkualitas** melalui penguatan sektor pendidikan.
- Rapat ditutup dengan seruan kolaborasi bersama untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai rencana.



RAPAT ZOOM KOORDINASI PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2025 DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 03 DESEMBER 2025

PEMBAHASAN

- Kebijakan Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Wilayah Papua
- Kebijakan Pemenuhan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Wilayah Papua Tengah Melalui Pengangkatan Dan Retribusi Asn Serta Penugasan Khusus Tahun 2026
- Pemenuhan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Wilayah Papua Tengah Melalui Pengangkatan Pegawai Blud Dan Penugasan Khusus Oleh Pemda Tahun 2026

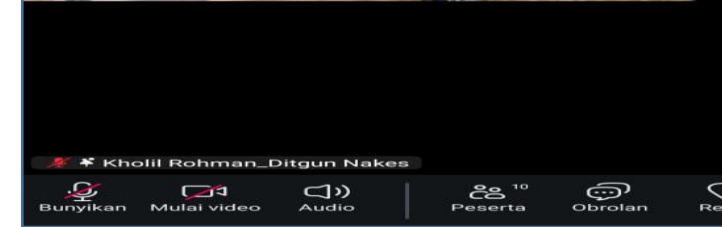
Hasil Pembahasan kementerian Kesehatan dengan BPO3OKP, BP3OKP Papua Tengah sudah sampaikan beberapa hal menjadi Rekomendasi antara lain:

A. Rekomendasi Kebijakan

- Integrasikan data kebutuhan SDM BLUD dan penugasan khusus.
- Tambahkan insentif untuk tenaga di wilayah 3T (tunjangan, rumah dinas, transportasi).
- Pastikan jalur afirmatif bagi OAP dalam pengangkatan BLUD dan penugasan khusus.
- Lakukan monitoring & evaluasi distribusi tenaga secara rutin.
- Kolaborasi BLUD + Pemda + pusat untuk keberlanjutan program.

B. Rekomendasi Umum

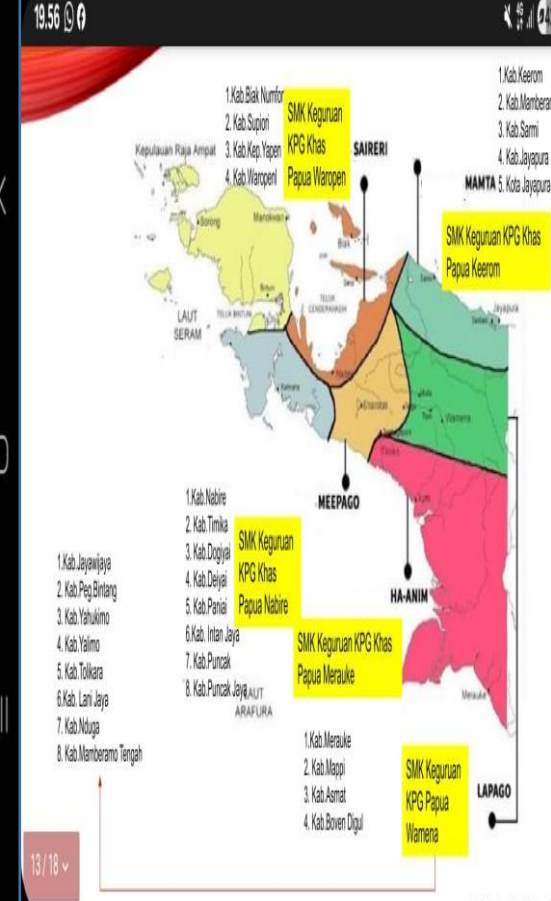
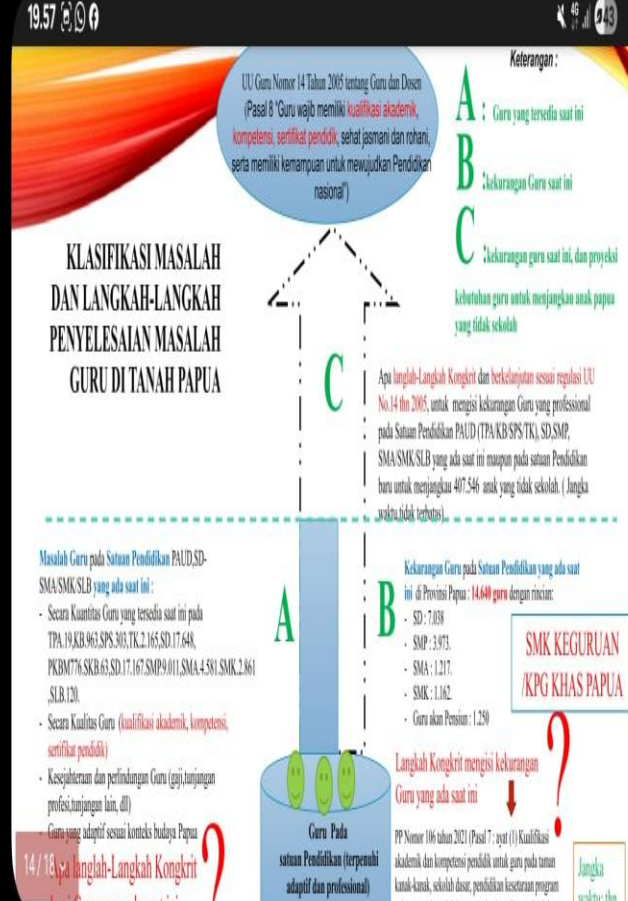
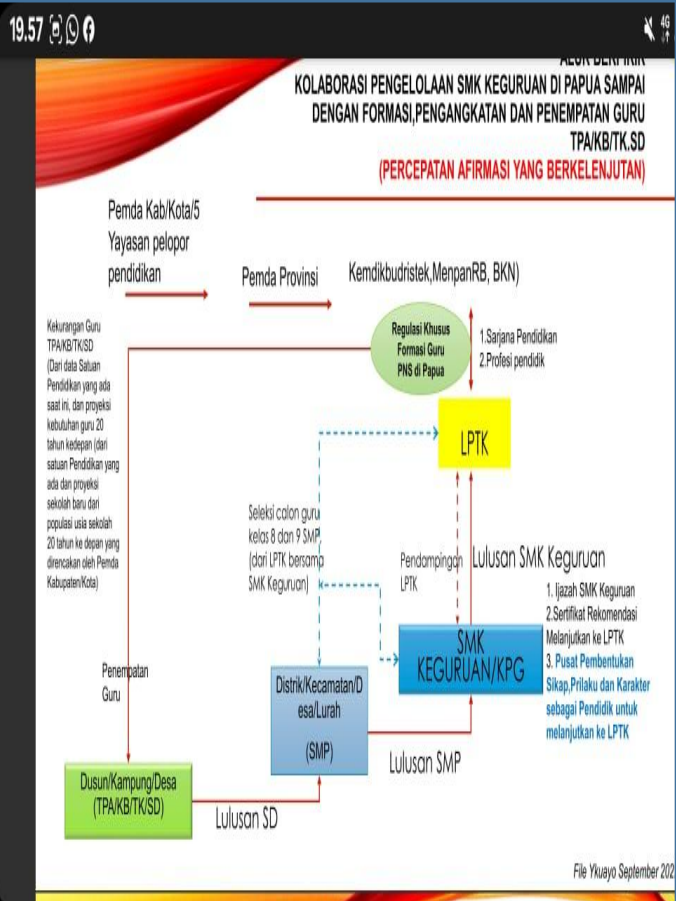
- Pembangunan Rumah Sakit Rujukan PPT pada tahun 2026
- Peningkatan dan Pembenahan Pelayanan RSUD yang ada terutama RSUD Sriwini Nabire
- Fokus Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Fokus penanganan Penyakit Menular Terutama HIV AIDS, TB Paru dan Eliminasi Malaria masih sangat jauh dari target nasional.
- Pemenuhan Tenaga Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sampai Daerah Terpencil
- Klasifikasi Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan lokus Daerah 3 T dan Daerah Konflik termasuk RS
- Peningkatan Fasilitas Kesehatan
- Mempersiapkan SDM Kesehatan OAP beberapa tahun kedepan agar menjangkau di daerah terpencil dan daerah konflik dan juga di RS.
- Sistem Perekrutan Tenaga Kesehatan harus diprioritaskan OAP dan sedangkan perekrutan NON OAP disesuaikan dengan tenaga kesehatan tidak tersanggupi oleh kuota OAP
- Memberikan Kemudahan ujian kompetensi dan Pengurusan STR cepat (STR khusus)
- Tenaga kesehatan yang STRnya sudah lewat waktu/sudah mati, tanpa melalui prosedur bisa diperpanjang. Kelompok ini mereka sudah lama mengabdikan di daerah pedalaman.





FGD Kajian Revitalisasi Klose Pendidikan Guru (KPG)Khas Papua di Nabire, 4 Desember 2025

- FGD hasil Kajian Revitalisasi SMK Terintegrasi BLK Komunitas,LKP dan PKBM pada:
- SMKS YPPK Agribisnis dan agroteknologi Nabire (TEFA :pusat produksi pakan ternak)
- SMKS YPK Energi dan Pertambangan Nabire (TEFA: mengelola SDA air,angin,matahari dll.sebagai tenaga listrik di kampung dan daerah 3t)
- SMKS YPPGI Agribisnis dan agroteknologi Dogiyai (TEFA: Pengembangan ayam petelur dan ayam pedaging)
- SMKS YPPK Agribisnis dan agroteknologi Deiyai (TEFA : pusat pelatihan dan penjualan bibit unggul dan pedaging ternak babi)SMK difungsikan juga menjadi pemberdayaan jemaat/umat berbasis gereja melalui SMK milik Gereja. BP3OKP Papua Tengah, Dinas Pendidikan Prov.Papua Tengah. Yayasan YPK.YPPGI.YPPK, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Papua Tengah.



DIALOG LITERASI KEBANGSAAN STIK LEMDIKLAT POLRI DI JAKARTA 10 DESEMBER 2025

Maksud dan Tujuan

Transformasi polri merupakan agenda strategis dalam rangka mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Namun demikian, di tengah berbagai upaya pembenahan struktural dan kultural, muncul pertanyaan publik: sejauh mana transformasi tersebut telah mewujudkan perubahan nyata, atau masih sebata retorika yang belum menyentuh akar persoalan? Kegiatan dialog literasi kebangsaan STIK lemdiklat polri ini diselenggarakan untuk membuka ruang diskusi reflektif dan kritis antara berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, pengawas eksternal, dan masyarakat sipil, guna menelaah secara jujur arah, capaian, dan tantangan transformasi polri dalam konteks penegakan hukum, akuntabilitas publik, serta budaya organisasi. Berikut beberapa tujuan yang diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam berdialog:

1. Mengulas capaian dan hambatan polri dalam menumbuhkan kultur kerja yang beretika, humanis, dan berfokus pada pelayanan publik.
2. Menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan akademisi, anggota polri, dan masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
3. Menjembatani dialog konstruktif antara polri dan masyarakat sipil guna memperkuat kepercayaan publik. Menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan arah transformasi polri ke depan



Rapat kordinasi Tindak lanjut terkait penyelenggaraan BPJS kesehatan antara BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS

Tanggal 11 April 2025

Kesimpulan Rapat

Point- Point yang dibahas antara lain:

- Kejelasan Aturan Klem BPJS Kesehatan Bagi 4 Rumah Sakit Pratama yang belum trakreditasi yang belum mendapat layanan BPJS Kesehatan
- Kelengkapan Persyaratan klem BPJS Bagi Rumah yang belum Akreditasi
- Masalah dan Tantangan dapat mengatasi upaya percepatan layanan BPJS Kesehatan di RSUD Pratama
- Point- Point yang dibahas antara lain:
- Kejelasan Aturan Klem BPJS Kesehatan Bagi 4 Rumah Sakit Pratama yang belum trakreditasi yang belum mendapat layanan BPJS Kesehatan
- Kelengkapan Persyaratan klem BPJS Bagi Rumah yang belum Akreditasi
- Masalah dan Tantangan dapat mengatasi upaya percepatan layanan BPJS Kesehatan di RSUD Pratama



Memposisikan Living Law Dalam Peradilan Adat Dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM Dalam Perspektif UU Otsus 12 Desember 2025

Tujuan Kegiatan

- Menguatkan peran DPR Papua Tengah dalam advokasi hak-hak masyarakat adat.
- 2. Menyatukan pemahaman akademik, hukum positif, dan hukum adat terkait penyelesaian sengketa dan pelanggaran HAM.
- 3. Mempertegas posisi living law dalam sistem peradilan nasional.
- 4. Mendorong kolaborasi pemerintah–kampus–masyarakat adat dalam perumusan kebijakan.
- 5. Merumuskan rekomendasi strategis untuk penyelesaian kasus HAM dan penguatan mekanisme peradilan adat.

Hasil yang Diharapkan

- Terbentuknya dokumen rekomendasi kebijakan untuk DPR Papua Tengah.
- Penguatan kapasitas hukum adat melalui dukungan akademik dari STIH Mimika.



Materi Pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA/SMK/SLB/ASRAMA dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah oleh Irjen.Pol. (Purn) Drs.Pietrus Waine,SH,M.Hum selalu kepala BPP Papua Tengah pada Kegiatan pelatihan Penyusunan Laporan Dana Bantuan Sekolah Gratis bersama BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua Tengah.Peserta yang hadir dari 124 SMA dan SMK. 3 SLB dan 13 Asrama se Papua Tengah.Pelaksanaan di Hotel Serayu Timika, tgl11-14 Des 2025

Maksud

- Menjadi wadah koordinasi antara **Pemerintah Daerah, BPP Papua Tengah, BPKP, Inspektorat, dan sekolah** dalam pengelolaan BOSDA.
- Memberikan **pemahaman menyeluruh** kepada kepala sekolah dan pengelola asrama tentang tata cara penggunaan serta pelaporan dana BOSDA.
- Memperkuat **fungsi pengawasan** agar dana bantuan sekolah gratis benar-benar digunakan sesuai peruntukan.
- Menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan praktik di lapangan sehingga tercapai **keseragaman sistem pelaporan**.

Tujuan

- **Meningkatkan kapasitas sekolah** dalam menyusun laporan dana BOSDA secara akuntabel dan transparan.
- **Mencegah penyalahgunaan dana** melalui pengawasan berlapis dari Inspektorat dan BPKP.
- **Membangun komitmen bersama** antara sekolah dan pemerintah daerah untuk mendukung program Sekolah Gratis.
- **Meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan** di Papua Tengah dengan sistem keuangan yang tertib dan sesuai regulasi.
- **Menyediakan forum diskusi** bagi SMA, SMK, SLB, dan Asrama untuk berbagi pengalaman serta solusi atas kendala pengelolaan dana BOSDA.



Rapat paripurna dalam rangka laporan hasil khusus kemanusiaan dan laporan hasil tim advokasi blok wabu Senin 14 Desember 2025

C. Kesimpulan Rapat

- Rapat paripurna menerima dan mencatat Laporan Hasil Khusus Kemanusiaan dan Laporan Tim Advokasi Blok Wabu.
- Seluruh rekomendasi menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
- Ditekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan, dialog, dan perlindungan hak masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan

D. Rekomendasi Rapat Paripurna

- Mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil dan rekomendasi rapat secara konkret.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu kemanusiaan dan advokasi masyarakat.
- Menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.



Rencana Aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2025-2029 di Jakarta bersama 6 BPP dan Komite baru. 14 Desember 2025

- “Bapak Presiden menginginkan ada satu instrumen untuk mengawasi apakah pelaksanaan program itu berjalan atau tidak di lapangan,” katanya.
- Ia menambahkan, pembentukan komite tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan Papua. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah strategis lain, salah satunya melalui pembentukan **Daerah Otonom Baru (DOB)** di wilayah Papua.
- Peluncuran RAPPP 2025–2029 turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, para kepala daerah se-wilayah Papua, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta pejabat terkait lainnya. **(bat)**

